

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan ini berdampak pada pemulihan hak-hak pemegang saham yang sebelumnya dirugikan akibat perubahan anggaran dasar yang tidak sah. Para pemegang saham yang telah kehilangan statusnya akibat keputusan Kemenkumham memperoleh kembali hak-hak mereka dalam perseroan, termasuk hak atas dividen, hak suara dalam RUPS, serta hak atas pengakuan kepemilikan saham. Perubahan anggaran dasar yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kemenkumham dinyatakan tidak sah karena dilakukan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan UUPT. Ketiadaan RUPS sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam perseroan mengakibatkan perubahan tersebut bertentangan dengan prinsip legalitas dan asas kepastian hukum. Putusan ini menegaskan bahwa perubahan anggaran dasar yang dilakukan tanpa keterlibatan seluruh pemegang saham yang sah merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan keadilan. Hakim menekankan bahwa seluruh tindakan hukum yang berkaitan dengan perubahan struktur kepemilikan saham harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatalan Surat Keputusan Kemenkumham menunjukkan bahwa pejabat tata usaha negara wajib memastikan bahwa keputusan yang dikeluarkan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, Kemenkumham diwajibkan untuk

mencabut atau merevisi keputusan yang telah dikeluarkan agar selaras dengan prinsip hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak pemegang saham. Putusan ini memberikan preseden penting dalam hukum korporasi di Indonesia, terutama dalam menjamin bahwa perubahan anggaran dasar harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan melibatkan seluruh pemegang saham yang berkepentingan. Selain itu, peran notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta autentik menjadi lebih krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum, sehingga dapat mencegah terjadinya cacat hukum dalam perubahan anggaran dasar suatu perseroan. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa setiap perubahan dalam perseroan harus dilakukan dengan transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Implikasi hukum dari pembatalan Surat Keputusan Kemenkumham dalam perkara ini memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham serta memastikan kepastian hukum dalam praktik tata kelola korporasi di Indonesia.

2. Dapat dianalisa hakim menilai bahwa perubahan anggaran dasar yang tidak melibatkan pemegang saham dalam RUPS bertentangan dengan Pasal 19 dan Pasal 21 UUPT. Putusan ini menegaskan bahwa setiap perubahan anggaran dasar harus melalui prosedur yang sah guna menjaga stabilitas hukum dalam hubungan antar pemegang saham. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa keputusan Kemenkumham yang mengesahkan perubahan anggaran dasar tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas telah menghilangkan hak hukum mereka secara sepihak. Oleh karena itu, pembatalan Surat Keputusan Kemenkumham bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hukum dan memberikan keadilan bagi para pemegang saham yang dirugikan. Majelis hakim merujuk pada

berbagai ketentuan dalam UUPT yang mengatur bahwa setiap perubahan dalam struktur perseroan harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan sah. Hakim juga mempertimbangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait tata cara perubahan anggaran dasar serta mekanisme pengesahannya. Putusan ini menyatakan bahwa Kemenkumham telah melanggar AUPB, khususnya asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas. Keputusan yang dikeluarkan tanpa verifikasi prosedural yang ketat menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa lebih lanjut di kemudian hari. Hakim dalam putusannya memberikan panduan bagi pemegang saham, notaris, serta otoritas terkait dalam memastikan bahwa setiap perubahan anggaran dasar dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Putusan ini menegaskan bahwa tindakan administratif yang melanggar prosedur hukum tidak dapat dijadikan dasar dalam struktur kepemilikan suatu perseroan. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang bersengketa tetapi juga menjadi pedoman dalam penerapan hukum korporasi dan administrasi negara guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemegang Saham dan Pengelola Perseroan Terbatas.**

Pemegang saham dan pengelola perseroan terbatas harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai regulasi yang mengatur perubahan anggaran dasar. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta menghindari potensi sengketa hukum yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham.

## 2. Penguatan Prosedur Pengawasan dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar.

Pemerintah dan otoritas terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, perlu memperketat pengawasan terhadap proses perubahan anggaran dasar. Mekanisme verifikasi yang lebih ketat harus diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah dipenuhi sebelum suatu perubahan dapat disahkan.

